

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di negara-negara berkembang saat ini lebih ditekankan pada pembangunan ekonomi, hal ini disebabkan karena terjadinya keterbelakangan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat mendukung pencapaian tujuan atau mendorong perubahan-perubahan dan pembaharuan pada bidang kehidupan lainnya, sehingga pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara terpadu, selaras, seimbang dan berkelanjutan, kemudian diarahkan agar pembangunan yang belangsung merupakan kesatuan pembangunan nasional. Sehingga dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional tersebut perlu adanya pembangunan ekonomi daerah yang pada akhirnya mampu mengurangi ketimpangan antar daerah dan mampu mewujudkan kemakmuran yang adil dan merata antar daerah tersebut.

Menurut Schumpeter dan Hicks dalam Jhingan (2003). tujuan pokok pembangunan ekonomi adalah untuk membangun peralatan modal dalam skala yang cukup untuk meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, pertambangan, perkebunan, jasa-jasa dan industri, dan pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah penciptaan modal *overhead* sosial dan ekonomi. Proses pembangunan ekonomi itu sendiri tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi memerlukan berbagai usaha yang konsisten dari berbagai pihak untuk memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi umat manusia.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru, serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2000).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di mana tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Kedua Undang-Undang tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi daerah, karena terjadinya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan yang selama ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Kegiatan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai usaha meratakan dan menyebarluaskan pembangunan untuk menyetarakan, menyeimbangkan, serta memadukan seluruh kegiatan. Pembangunan daerah haruslah dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu antar sektor.

Salah satu upaya untuk menjabarkan kebijaksanaan pembangunan ekonomi di tingkat daerah, maka diperlukan suatu kawasan andalan yang berorientasi untuk mengembangkan potensi daerah. Menurut Royat dalam Mudrajat Kuncoro (2002) kawasan andalan merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai penggerak perekonomian wilayah, yang mana memiliki kriteria sebagai kawasan yang cepat tumbuh dibandingkan lokasi lainnya dalam satu provinsi atau kabupaten, memiliki sektor basis dan memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah sekitar.

Pencapaian keberhasilan pembangunan daerah melalui pembangunan ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah serta diperlukan perencanaan pembangunan yang terkoordinasi antar sektor, perencanaan pembangunan disini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Keterbatasan sumber daya di suatu daerah baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya financial maupun sumber daya lainnya yang merupakan masalah umum yang

dihadapi oleh sebagian besar daerah untuk dapat menggerakkan seluruh perekonomian yang mampu sebagai penggerak utama untuk memacu laju pembangunan disuatu daerah.

Namun pada prakteknya, otonomi daerah memunculkan beberapa permasalahan yang disebabkan perencanaan pembangunan di masing-masing daerah yang berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi. Sehingga dibutuhkan suatu kerangka keterpaduan pemabangunan dengan penekanan muatan yang berorientasi pada wilayah yang lebih luas, keterpaduan antar sektor, antar wilayah, dan antar pelak pembangunan, keterpaduan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan , menggunakan prinsip sinergi pembangunan dan kemamfaatan bersama.

Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kedua Undang-undang tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi daerah, karena terjadinya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan yang selama ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Kewenangan yang dimaksud mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama serta moneter dan fiskal. Kewenangan pembiayaannya, yaitu daerah tersebut dapat menggali sekaligus dapat menikmati sumber-sumber potensi ekonomi, serta sumber daya alam tanpa ada intervensi terlalu jauh dari pemerintah pusat. Hal ini akan berdampak terhadap perekonomian daerah yang pada akhirnya terciptalah peningkatan pembangunan daerah.

Menurut pemikiran ekonomi klasik bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di daerah yang miskin sumber daya alam. Hingga tingkat tertentu, anggapan ini masih bisa dibenarkan, dalam artian sumber daya alam harus dilihat sebagai modal awal untuk pembangunan yang

selanjutnya harus dikembangkan terus. Dan untuk ini diperlukan faktor-faktor lain, diantaranya yang sangat penting adalah teknologi dan sumber daya manusia (Tambunan, 2000).

Perbedaan tingkat pembangunan yang di dasarkan atas potensi suatu daerah, berdampak terjadinya perbedaan sektoral dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara hipotesis dapat dirumuskan bahwa semakin besar peranan potensi sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDRB di suatu daerah, maka semakin tinggi laju pertumbuhan PDRB daerah tersebut.

Berdasarkan pengalaman negara-negara maju, pertumbuhan yang cepat dalam sejarah pembangunan suatu bangsa biasanya berawal dari pengembangan beberapa sektor primer. Pertumbuhan cepat tersebut menciptakan efek bola salju (*snow ball effect*) terhadap sektor-sektor lainnya, khususnya sektor sekunder. Pembangunan ekonomi dengan mengacu pada sektor unggulan selain berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi juga akan berpengaruh pada perubahan mendasar dalam struktur ekonomi.

Menurut Rachbini (2001) ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor prioritas, yakni (1) sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar, sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut; (2) karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif, maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas; (3) harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasilhasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah; (4) sektor tersebut harus berkembang, sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.

Kota Payakumbuh sebagai salah satu dari tujuh belas Kabupaten / Kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat saat ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di berbagai bidang. Dengan diberikannya wewenang untuk mengatur dan mengelola daerah sendiri, Kota

Payakumbuh harus mampu memanfaatkan kesempatan ini sebagai salah satu jembatan untuk membuktikan bahwa kota ini mampu secara mandiri mengatur dan mengelola daerahnya sendiri, dengan tidak melupakan adanya kekuatan, kelemahan, tantangan dan ancaman yang akan dihadapi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Kinerja pembangunan Kota Payakumbuh sendiri di bidang ekonomi khususnya, pada tahun 2000-2009 berdasarkan data PDRB kota atas dasar harga berlaku maupun harga konstan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama dalam jasa-jasa yaitu pemerintahan umum dan pertahanan yang merupakan sektor paling dominan pada PDRB Kota Payakumbuh itu sendiri. Kondisi tersebut tercermin pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang diciptakan baik pada tingkat Provinsi Sumatera Barat maupun pada tingkat Kota Payakumbuh itu sendiri (*Data Kota Payakumbuh dan Sumbar dalam angka, BPS 2000-2009*).

Sektor jasa-jasa seperti sektor pemerintahan umum dan pertahanan maupun sektor swasta merupakan salah satu yang paling dominan, dimana sektor ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan perekonomian masyarakat kota Payakumbuh. Oleh karena itu sangat perlu sekali mengembangkan potensi tersebut yang mana sangat berpengaruh pada kebijakan dan strategi pembangunan daerah Kota Payakumbuh itu sendiri.

Masyarakat Kota Payakumbuh memiliki hubungan sosial yang sangat kuat, ajaran agama, falsafah adat dan budaya yang melandasi hubungan kekerabatannya. Kerjasama sosial dan ekonomi yang kuat dalam membangun potensi daerah dimana hal tersebut dapat menggambarkan bahwa adanya hubungan yang kuat antara masyarakat yang tinggal di kampung dengan yang ada di perantauan.

Hal inilah yang menjadi alasan bagi pemerintah Kota Payakumbuh dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan daerah yang berlatarkan belakang terhadap sektor-sektor pembangunan daerah khususnya sektor basis yang mana dapat meningkatkan pembangunan daerah itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membahas suatu strategi pembangunan ekonomi bagi Kota Payakumbuh yang mana dapat dianalisis dengan melihat sektor basis atau unggulan yang ada pada kota Payakumbuh tersebut, dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “ **STRATEGI PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN KOTA PAYAKUMBUH BERDASARKAN ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DENGAN PENDEKATAN SEKTOR PEMBENTUK PDRB**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Sektor ekonomi apa sajakah yang dapat dijadikan sebagai sektor basis atau atau sektor unggulan dalam pembangunan perekonomian Kota Payakumbuh?
2. Strategi apakah yang dapat diterapkan Kota Payakumbuh dalam pembangunan daerahnya berdasarkan sektor basis atau sektor unggulan tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan analisis untuk menentukan sektor-sektor apa sajakah yang dapat dijadikan sebagai sektor ekonomi unggulan di Kota Payakumbuh
2. Untuk merumuskan strategi pembangunan daerah Kota Payakumbuh sesuai dengan adanya sektor basis tersebut.

1.4 Mamfaat Penelitian

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermamfaat sebagai bahan informasi bagi penelitian sejenisnya.
2. Diharapkan hasil penelitian ini juga dapat bermamfaat sebagai bahan masukan bagi pemerintah setempat dalam menyusun suatu dokumen perencanaan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sektor-sektor ekonomi yang produktif yang ada di Kota Payakumbuh baik itu pada sektor primer, sekunder, maupun tersier yang mana hasil yang diperoleh adalah berupa sektor-sektor unggulan yang akan dikembangkan di Kota Payakumbuh sebagai pengembangan perekonomian Kota Payakumbuh kedepan

Pembahasan penelitian ini akan dimualai dari masing-masing sektor perekonomian yang dihasilkan dari analisis penentuan sektor unggulan atau sektor basis (LQ), kemudian menggunakan Analisis Shift Share dimana sangat berguna sekali untuk membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor (industri) di daerah studi dengan wilayah nasional. Dan yang terakhir menggunakan metode analisa SWOT yang mana sangat berguna juga untuk menentukan sektor basis apakah yang paling dominan di Kota Payakumbuh tersebut, serta juga menganalisis strategi pembangunan Kota Payakumbuh berdasarkan sektor unggulan tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam pemahaman skripsi ini, maka disusunlah sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bagian awal dari skripsi ini terdiri dari : halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar

lampiran. Bagian isi terdiri dari enam bab. Adapun substansi dari masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori yang dipakai sebagai acuan dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi di Kota Payakumbuh. Selain itu juga terdapat tinjauan pustaka (bahan bacaan) yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai populasi penelitian, variabel-variabel penelitian dan definisi operasional, metode pengumpulan data serta analisisnya.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini dijelaskan mengenai keadaan geografis dan jumlah penduduk di daerah Kota Payakumbuh, dan perkembangan perekonomian daerah Kota Payakumbuh, antara lain: laju pertumbuhan dan kontribusi ekonomi, pendapatan perkapita.

BAB V PENEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI PENEMUAN

Bagian ini merupakan hasil temuan peneliti yang terdiri dari tiga sub bab yaitu temuan empiris dari penelitian, implikasi kebijakan dan keterbatasan penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang konstruktif untuk dilakukannya perbaikan-perbaikan dan kemungkinan-kemungkinan solusi alternatif sebagai jawaban atas munculnya berbagai permasalahan yang ada berdasarkan hasil penelitian.

Bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran - lampiran. Daftar pustaka berisi daftar buku-buku acuan yang digunakan sebagai dasar dalam penulisan skripsi ini, sedangkan lampiran-lampiran berisi pengolahan data, dan lembar instrumen penelitian.

